

ISLAM DAN BUDAYA KORUPSI DALAM KEBOHONGAN STATISTIKA

Fatati Nuryana

*(Dosen Ilmu Statistik Hukum dan Perbankan Syariah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan, nomor kontak 088803286477,
fnuryana@yahoo.com, alamat Jl. Pahlawan Km 04 Pamekasan)*

Abstract

Statistics is often assumed with the data formed figure, the result of accounting, or others related with the data collection. Statistics is a tool believed to express a scientific truth.. Unfortunately, this tool is often misused to reach the individual purposes suitable with it is wanted. Statistics is done by any way, beginning from incorrect sample taking, manipulating the data to the solution taking which is not suitable with the real result that can be the first becoming corruption that is forbidden in Islam. This writing wants to analyze the kinds of lie statistics forms that can bring to the corruption action, its view and solution according to Islamic perspective.

Kata-kata kunci

Islam , korupsi, kebohongan statistika, manipulasi.

Pendahuluan

Statistik (statistika) senantiasa diasumsikan dengan data yang berbentuk angka, hasil perhitungan, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan pendapatan. Gambaran hasil survei tentang partai politik, calon gubernur atau bahkan banyaknya subsidi pupuk dari pemerintah, gambaran jumlah penganggur, jurnal statistik hasil permainan sepak bola, bursa efek dan kurs mata uang, jadwal keberangkatan pesawat terbang, dan lain sebagainya merupakan sebagian contoh yang sangat berkaitan dengan data statistik dan statistika.

Kemampuan statistik dalam menggunakan data numerik atau grafis untuk mengenali pola kelakuan data, merangkum dan menyajikan informasi (diskriptif) memiliki kekuatan berupa diskripsi yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata. Terlebih lagi jika berbicara statistik sampai dengan membuat simpulan, mempredisikan, kejadian, mencari hubungan antar data sampai generalisasi ke populasi (inferensial), letak kekuatan analisisnya berupa perhitungan numerik yang dipakai sebagai dasar menolak atau menerima hipotesis. Hasil-hasil yang ditunjukkan

statistik baik deskriptif maupun inferensial seakan-akan menjadi sebuah kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan karena dapat dibuktikan secara ilmiah.

Memang diakui bahwa statistika memainkan peranan yang semakin penting hampir dalam semua tahap usaha manusia saat ini. Kemampuan statistik menampilkan dan menyelesaikan persoalan yang kompleks dalam wujud angka, telah menjadikan metode yang berdayaguna untuk menentukan pilihan. Akan tetapi, saat ini banyak pihak yang menganggap statistik sebagai pisau bermata dua. Selain kontribusinya pada dunia penelitian, statistik bisa membuat fakta tampak berbeda, kabur dan keliru. Statistik yang dipercaya oleh sebagian besar orang merupakan hasil yang valid dengan tingkat kesalahan tertentu, terkadang disalahgunakan menjadi sebuah alat untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi sesuai dengan yang diinginkan, mulai dari pengambilan sampel yang tidak benar, memanipulasi data sampai pengambilan kesimpulan yang tidak sesuai dengan hasil yang sebenarnya.

Suatu Kebohongan dalam Statistik

Dalam bukunya *Berbohong dengan Statistik*, Darrel Huff¹ mengungkapkan bahwa kebohongan itu terdiri atas 3 tingkatan, dan statistik merupakan kebohongan tingkat tertinggi. Kebohongan yang pertama adalah kebohongan tanpa polesan, kebohongan tingkat kedua adalah menipu dan kebohongan yang paling tinggi

tingkatannya adalah kebohongan dengan kebenaran statistik.

Ilustrasi dari 3 jenis kebohongan diatas adalah sebagai berikut. Jika seseorang akan menjual sebuah mobil, orang bisa mengatakan bahwa mobilnya baru (padahal sebenarnya pada petunjuk kilomernya, misalnya sudah mencapai 100.000 kilometer). Namun, orang tersebut tidak memberikan polesan apa pun pada mobil tersebut, dia hanya mengatakan bahwa itu adalah mobil baru. Itu disebut sebagai kebohongan (tingkat pertama) karena dia tidak melakukan tindakan untuk menutupi kebohongannya. Penjualan mobil dikatakan menipu apabila ia mengatakan bahwa mobilnya baru dan kemudian ia melakukan berbagai usaha, di antaranya menurunkan angka kilometer, body mobil dicat ulang, mesin dibersihkan, bannya diganti baru. Karena di make-up seperti baru lagi, penjual itu mengatakan mobilnya baru. Dengan tindakannya tersebut pembeli menjadi tertipu. Dia telah menipu karena semuanya itu ditambahkan atau diubah agar tampak baru untuk menutupi kebohongannya tersebut.

Sedangkan apabila penjual melakukan survei kepada 2.000 orang dengan mengajukan pertanyaan yang tidak objektif, misalnya; "Jika dibandingkan dengan mobil yang telah mencapai kilomernya yang ke 200.000, apakah mobil dengan kilometer 100.000 termasuk baru?". Menjawab pertanyaan semacam itu kemungkinan besar responden akan menjawab bahwa mobil dengan kilometer 100.000 tersebut termasuk baru. Kemudian jawaban responden dijadikan bukti ilmiah yang tidak terbantahkan untuk mengatakan mobil dengan kilometer mencapai 100.000

¹ J. Soetikno PR. & Christina M. Udiani, (2003). *Berbohong dengan Statistik* (Terjemahan Huff, Darrel dan Irving Geiss, (1954). *How to Lie with Statistics*). Norton, New York. Diterjemahkan :. Kepustakaan Populer Gramedia, Cetakan kedua: Agustus 2003.

adalah tergolong baru, ini merupakan kebohongan tingkat tiga.

Bentuk Kebohongan dalam Statistik

Ada banyak jenis kebohongan statistik, mulai pengambilan sampel yang tidak benar, sampai dengan pengambilan kesimpulan yang tidak sesuai dengan hasil yang sebenarnya. Memberi informasi yang salah dengan menggunakan bahan-bahan statistik—dikatakan memanipulasi statistik—juga merupakan salah satu kebohongan statistik. Darrel Huff² memberikan istilah statistikulasi terhadap hal ini, karena menggunakan statistik untuk manipulasi. Beberapa jenis kebohongan³ dalam statistik adalah :

1. Menggunakan angka-angka yang tampak berhubungan dan pengukuran yang baik, padahal sesungguhnya tidak, misalnya meng-hitung rata-rata tanpa me-nampilkan pencilan dalam data,
2. Dibangun berdasarkan sampel yang bias yaitu cara pengambilan sampel yang kurang tepat dan kecilnya ukuran sampel,
3. Pemilihan objek dari penelitian. Siapa yang disurvei dan siapa respondennya. Hati-hati dengan kalimat,
4. Menampilkan nilai rata-rata tanpa menampilkan *range* (selisih nilai terbesar dengan terkecil),
5. Mempermainkan angka-angka yang secara statistik sebenarnya tidak signifikan,
6. Kesimpulan akhir yang tidak tepat; (a) korelasi yang sesungguhnya kemungkinan acak, (b) variable sebab akibat yang terbalik, (c) hubungan yang dimaksud bisa karena faktor ketiga, (d) data yang diambil dari sumber yang baik, tetapi kesimpulannya tidak tepat,
7. Membuat prediksi diluar jangkauan data (melakukan prediksi yang terlalu jauh),
8. Tidak melakukan perbandingan. Sejumlah angka yang disebutkan dalam penelitian akan menjadi tidak berarti jika tidak dibandingkan dengan penelitian lain/ terdahulu,
9. Menghilangkan sebagian angka untuk mengaburkan hasil, dan
10. Menyatakan apa yang dikatakan responden menjadi apa yang dilakukan oleh responden tersebut.

Praktik Kebohongan Statistik

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa kebohongan dalam statistik dapat menjadi langkah awal yang mengantar pada tindak pidana korupsi. Ini disebabkan adanya ketidakjujuran dalam mengungkapkan data, sementara data yang ditampilkan dipercaya kebenarannya. Ketidakjujuran tentu saja sangat dilarang di dalam Islam. Berikut ini beberapa praktek kebohongan statistik yang terjadi di masyarakat terutama dalam pemerintahan.

1. Menghitung nilai rata-rata tanpa mengeluarkan pencilan.

Hasil penelitian di sebuah desa yang dilakukan aparat desa menyebutkan bahwa penduduk masyarakat di sana berpenghasilan rata-rata Rp 3 juta/ bulan. Padahal penduduk desa tersebut rata-rata

² *How to Lie With Statistics* pertama kali terbit pada 1954 dan direvisi pada 1973. Contoh-contoh di dalamnya sebagian berasal dari berbagai surat kabar atau majalah terbitan sebelum 1954 hingga 1973. Buku ini tergolong klasik dan dipuji oleh banyak ahli statistik. Pada edisi bahasa Indonesia, penerjemah menambahkan beberapa catatan kaki pada beberapa kasus yang dirasa kurang populer untuk pembaca di Indonesia agar konteks persoalan menjadi lebih jelas.

³ Huff, Darrel dan Irving Geiss, (1954). *How to Lie with Statistics*. Norton, New York.

berprofesi sebagai petani penggarap, buruh pabrik bahkan pengangguran. Ini adalah hasil yang tidak masuk akal. Survey atau pengambilan sampel tanpa melakukan filter data dan mengeluarkan pencilaan data yang ada pada responden akan mengaburkan kondisi yang sebenarnya. Jika diselidiki di desa tersebut tinggal 2 orang, satu orang berkebangsaan Korea yang memiliki pabrik sarung tangan golf dengan omset bulanan hampir 1 Milyar rupiah dan seorang pengusaha gypsum dengan omset Rp 250 juta/bulan. Dengan kondisi ini apabila penghasilan seluruh RW (termasuk 2 orang pengusaha tersebut) dirata-rata jadi satu akan memberikan nilai penghasilan rata-rata yang tinggi, walaupun di dalamnya ada banyak orang dengan penghasilan dibawah Rp.100.000,- per bulan. Jika nanti ada program bantuan dari pemerintah untuk masyarakat miskin, akan ada pihak yang diuntungkan karena kategori miskin menurut pemerintah dan desa berbeda. Menurut pemerintah masih miskin tetapi aparat desa tidak demikian.⁴

2. Telepoling

Melakukan generalisasi melalui telepoling terhadap tingkat popularitas seorang calon bupati atau presiden. Telepoling tidak dapat menggambarkan secara signifikan kondisi masyarakat yang sesungguhnya. Alasan *pertama*, berapa banyak masyarakat Indonesia yang memiliki telepon/ hp di rumahnya sementara telepon/ hp masih menjadi barang mewah di sebagian tempat di negeri ini, jadi sampel dalam penelitian tersebut hanya mampu mencakup kalangan menengah ke atas. Alasan *kedua*,

penelitian mengeneralisir kesimpulan menjadi "masyarakat Indonesia". Sementara dari masyarakat yang memiliki telepon belum tentu 30% yang peduli terhadap telepoling dan menelpon.⁵

Hasil telepoling ini bukan tidak mungkin merupakan pesanan dari para calon untuk mendongkrak popularitasnya. Dengan biaya yang begitu besar dikeluarkan untuk melakukan telepoling, tentu saja mereka tidak mau rugi dan apabila calon tersebut benar-benar terpilih, maka peluang terjadinya korupsi akan semakin besar.

3. Pemanfaatan Lembaga Survei Untuk Mendongkrak Popularitas Calon dalam Pilkada.

Dalam negara demokrasi modern, kehadiran survei adalah hal yang wajar. Pelaksanaan pilkada dan pemilu bisa menjadi ajang kompetisi bagi lembaga-lembaga survei. Faktor perubahan pendapat masyarakat dan opini bisa mengubah pilihan publik dari pasangan kandidat tertentu ke calon lain, walaupun hasil survei lembaga yang kredibilitasnya kadang meleset. Beberapa lembaga survei dibayar untuk melakukan pemihakan. Kampanye terselubung lewat lembaga survei juga terbukti ada misalnya calon gubernur yang membuat sendiri lembaga survei agar popularitasnya naik.⁶

4. Data Kemiskinan dan Pengangguran

Presiden Yudhoyono dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 2006 menyampaikan data-data kemiskinan di Indonesia turun dari 23,4 persen pada tahun 1999 menjadi 16 persen pada tahun 2005. Menurut pengamat hal tidak sesuai

⁴ Valid Consulting. 2008. *Catatan Harian Riset. Hasil observasi dan interview*. Tidak diterbitkan.

⁵ Huff, Darell & Geis, Irving. 1973. *How to Lie with Statistics*. Penguin Books.

⁶ www.suarapembaruan.com

⁷ Wahyudin Munawir, *Kemiskinan dan Statistik*, www.suarapembaruan.com

dengan kenyataan di lapangan. Menurut Tim Indonesia Bangkit data kemiskinan yang disampaikan Presiden tersebut tidak menggambarkan kondisi riil saat ini karena diambil dari hasil survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Februari 2005. Padahal saat pengambilan sampel untuk survei Susenas tersebut belum ada kenaikan harga BBM. Kenaikan BBM antara 100 - 300 persen baru terjadi Oktober 2005. BPS sendiri telah memperbarui data kemiskinan melalui

Susenas Juli 2005 dan Maret 2006. Tapi sayangnya, data yang *up to date* tersebut belum dilaporkan sehingga pemerintah menggunakan data yang *out of date* (hasil Susenas sebelum Oktober 2005), sehingga angka kemiskinan turun signifikan, 7,3 persen, dari tahun 1999 sampai 2005.

Pemaparan angka kemiskinan itu juga tidak konsisten dengan angka kemiskinan yang berkaitan dengan penerima bantuan langsung tunai (BLT) pada tahun 2006, yaitu 19,2 juta keluarga. Perima BLT terdiri dari keluarga sangat miskin, miskin, dan hampir miskin. Jika diasumsikan secara konservatif 33 persen penerima BLT adalah keluarga hampir miskin dan tidak diperhitungkan, masih terdapat 12,8 juta keluarga miskin dan sangat miskin.

Jumlah 12,8 juta keluarga itu dengan asumsi tiap keluarga terdiri atas empat orang (suami istri dan dua anak) setara dengan 51.2 juta penduduk atau sekitar 23 persen dari total jumlah penduduk Indonesia (220 juta jiwa).

Data lain juga menunjukkan angka yang hamper sama, seperti pengajuan anggaran Bulog dalam alokasi beras untuk orang miskin (raskin), yang jumlahnya 12,2 juta keluarga. Hal tersebut menunjukkan angka kemiskinan hampir-hampir tidak berkurang.

Presiden juga menyatakan angka pengangguran turun dari 11,2 persen pada November 2005 menjadi 10,4 persen pada Februari 2006. penurunan angka pengangguran yang 0,8 persen tersebut dirasa tidak masuk akal sebab setelah kenaikan harga BBM yang amat tinggi banyak industri yang bangkrut dan mem-PHK karyawannya. Di samping itu, dengan kenaikan harga BBM daya beli masyarakat juga turun. Berdasarkan survei sejumlah lembaga penelitian, diperoleh data bahwa pada triwulan IV tahun 2005 (setelah kenaikan harga BBM) dan triwulan I-2006, sektor industri mengalami penurunan omzet penjualan antara 30 dan 60 persen. Penyebabnya kenaikan harga BBM itu tadi. Pada periode itu juga terjadi PHK di sejumlah industri. Kontribusinya pada penambahan jumlah pengangguran berkisar antara 0,5-1 persen. Namun demikian, pemerintah memperhitungkan dalam kurun waktu enam bulan (triwulan IV-2005 sampai triwulan I-2006) pengangguran justru berkurang 0,8 persen. Menurut catatan Tim Indonesia Bangkit, data versi pemerintah tersebut kemungkinan besar muncul dari tenaga musiman di sektor pertanian yaitu tenaga kerja yang hanya bekerja sementara waktu panen saja. Ini artinya, mereka sebetulnya tetap menganggur dan belum mendapat pekerjaan tetap/ permanen. Pendataan BPS dilakukan saat musim panen 2006. Oleh karena itu penggunaan data Februari 2006 seharusnya diperbandingkan dengan data Februari tahun sebelumnya. Dari data BPS diperoleh kenyataan bahwa pengangguran Februari 2006 sebesar 10,4 persen tercatat lebih tinggi dibanding pengangguran Februari 2005 sebesar 10,3 persen. Jadi, penurunan angka pengangguran dari November 2005 ke Februari

2006 sebesar 0,8 persen tersebut sebetulnya hanya manipulasi data saja yang tidak konsisten kriteria dan parameteranya.

5. Mark up Data

Para kontraktor proyek di sebagian besar departemen pemerintahan sudah terbiasa memanipulasi data. Dengan memanipulasi angka dan data, para kontraktor bisa melakukan mark up proyek-proyek infrastruktur seperti jalan raya, bendungan, pelabuhan, dan lain-lain. Akibat manipulasi data tersebut, banyak proyek infrastruktur yang rusak sebelum masanya. Misalnya, jalan-jalan raya di sejumlah provinsi di Indonesia kondisinya amat memprihatinkan, walaupun tiap tahun dilalukan perbaikan. Hal ini disebabkan adanya manipulasi data dan angka dalam proyek tersebut.

Korelasi Perilaku Korupsi dan Kebohongan Statistika

Berbohong melalui angka-angka statistik adalah kejahatan yang sangat elegan karena hasil-hasil statistik merupakan alat yang dipercaya untuk menyampaikan sebuah kebenaran yang dapat dibuktikan secara ilmiah melalui pengujian-pengujian hipotesisnya. Pengambilan sampel yang tidak benar, memanipulasi data sampai pengambilan kesimpulan yang tidak sesuai dengan hasil yang sebenarnya dapat menjadi langkah awal terjadinya korupsi yang sangat dilarang di dalam Islam. Dengan berbohong, manipulasi dan lain-lain, seseorang akan mudah mengambil kebijakan sesuai yang diinginkan, mengabaikan data yang berujung pada penggelapan uang (korupsi).

Ironisnya, kebohongan statistik melalui manipulasi data dan angka itu

dilakukan secara konspiratif antara berbagai pihak terkait. Menurut Ketua Umum Lembaga Perlindungan Konsumen Jasa Konstruksi (LPKJK), Bambang Pranoto, kebocoran di sektor konstruksi mencapai Rp76,7 triliun pertahun. Perhitungannya, dari tahun 1999 sampai tahun 2004 ada dana sebesar Rp 130 triliun pertahun yang dikucurkan untuk sektor konstruksi. Selain itu masih ada dana Rp340 triliun dalam bentuk pengadaan barang. Menurut perhitungan LPKJK, akibat kebocoran yang mencapai lebih dari 50 persen tersebut, uang yang menguap sebesar Rp76,7 triliun pertahun hanya di sektor jasa konstruksi saja (belum termasuk dalam bidang pengadaan barang yang korupsinya berupa mark up harga barang dan lain-lain). Ini jumlah uang yang amat besar. Jika tahun 2006 pemerintah hanya mengalokasikan dana perbaikan infrastruktur jalan raya yang rusak sebesar Rp 5,1 triliun, berarti uang yang bocor tiap tahun di sektor konstruksi tersebut (jalan raya, pelabuhan, jembatan, dan lain-lain) nilainya 15 kali dana perbaikan Infrastruktur jalan raya di atas. Ini artinya, jika tidak ada kebocoran, infrastruktur di Indonesia tidak mengalami kerusakan seperti sekarang. Akibat kebocoran tersebut – yang tentu saja disertai manipulasi data dan angka - infrastruktur di Indonesia kualitasnya amat rendah. Hanya karena hujan saja, banyak jalan raya yang langsung rusak.

Manipulasi data kemiskinan dan pengangguran tentu saja sangat berbahaya terhadap masyarakat apalagi menyangkut data kemiskinan sebuah institusi besar seperti negara. Jika tampilan data itu dimanipulasi, maka kebijakan pemerintah pun akan salah arah. Jika salah arah, maka tujuan pembangunan pun tidak tercapai.

Artinya, banyak dana terbuang dan korupsi makin marak. Dengan kata lain hasil kerja pemerintah mubazir. Dari perspektif itulah kita melihat manipulasi data pada jumlah orang miskin dan pengangguran yang disampaikan Presiden Yudoyono. Data kemiskinan dan pengangguran yang manipulatif merupakan kerja konspiratif untuk menutupi buruknya kinerja pemerintah.

Di departemen dan lembaga lain pun, manipulasi data tersebut niscaya terjadi. Logikanya, jika di lembaga kepresidenan saja korupsi data mencul sangat jelas di depan publik, apalagi di departemen. Namun demikian, korupsi data di departemen jarang terkuak ke permukaan karena ada kongkalikong antara pejabat bersangkutan dengan BPK dan KPK. Ini berbeda dengan manipulasi di lembaga kepresidenan, gampang terkuak karena pengawasnya tak gampang disuap.

Kebohongan dalam Pandangan Islam

Kebohongan statistik melalui perilaku manipulasi data merupakan tindakan ketidakjujuran sangatlah tercela dalam agama Islam. Ada banyak ayat yang menunjukkan larangan kepada kita untuk melakukan kebohongan sebagaimana al-Qur'an menjelaskan;

Dan seorang laki-laki yang beriman di antara pengikut-pengikut Firaun yang menyembunyikan imannya berkata: "Apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki karena dia menyatakan: "Tuhanku ialah Allah, padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Tuhanmu. Dan jika ia seorang pendusta maka dialah yang menanggung (dosa) dustanya itu; dan jika ia seorang yang benar niscaya sebagian (bencana) yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu". Sesungguhnya Allah

tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta (QS. 40: 28).

Dalam sebuah hadis juga disebutkan:

"Jujurlah kalian karena kejujuran membawa kebaikan dan kebaikan mengantarkan ke surga. Hati-hati dengan kepalsuan karena ini mengantarkan kepada ketidakmoralan dan ketidakmoralan mengantarkan ke Neraka."

Namun demikian sebagian berbuat berbohong dibenarkan dalam agama Islam, berbohong ada kalanya tidak tercela bilamana lebih bermanfaat bagi kesejahteraan dan kemaslahatan umum serta dalam penyelesaian perkara tertentu, menurut sebagian hadits "ia bukan orang yang curang demi untuk menyelesaikan perkara yang mendukung hal-hal kebenaran dan atau mengatakan apa yang benar."⁷ Sebagaimana al-Qur'an mengisyaratkan bahwa:

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar) (QS. 5 : 89).

Demikian juga dalam surat yang lain Allah swt. mengisyaratkan:

Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya) (QS. 2 : 225).

⁷ Dijelaskan dalam buku "The spirit of Islam," yang ditulis oleh pakar Muslim, Afif A. Tabbarah hal 247

Sedangkan dalam surat lainnya Allah swt berfirman:

Allah swt. tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun (QS. 16 : 106).

Dalam salah satu riwayat ketika puteri Muhammad saw. (Ummi Kaltsum ra) mengatakan bahwa ia tidak pernah mendengar Rasulullah mentolelir dan mensahkan perilaku kebohongan kecuali dalam tiga situasi; ⁸ dalam rekonsiliasi antara pihak-pihak yg bersengketa, dalam peperangan, dan diantara suami – istri demi menjaga kerukunan rumah tangga.

Demikian praktik kebohongan yang selama ini terjadi di masyarakat Islam sangat responsif dan menjaga batas-batas kebohongan. Sedangkan perilaku kebohongan dalam data statistik merupakan operandi yang tentu punya alasan tersendiri sehingga Islam mengkaitkan perilaku ini sebagai fenomena yang aktual dan dilarang dalam oleh agama Islam yang sangat dekat dengan tindak perilaku “korupsi”.

Islam dan Penanganan Korupsi

Sebagai suatu fenomena kejahatan luar biasa, “korupsi” memiliki banyak wajah. Salah satunya adalah kebohongan dalam statistika merupakan biang korupsi dan memerlukan penanganan strategis dan terpadu dengan melibatkan semua pihak *stakeholders* di masyarakat. Masyarakat sebagai pilar utama mempunyai peran kearifan budaya berupa persepsi, baik dalam pemikiran maupun perasaan kolektif, serta sistem

sosial yang mengikat dan berlaku sehingga penanganan perilaku korupsi ini akan lebih efektif dengan kerja keras melalui langkah-langkah sistemik dan terpadu.⁹

Islam memberikan tawaran kehidupan secara syari’ah agar masyarakat dapat hidup dengan aman dan sesuai fitrahnya kemanusiaannya, sesuai dalam budaya masyarakat dapat digali sejumlah hukum syari’ah untuk diterapkan bagi kehidupan tingkat personal, maupun komunal agar terbangun persepsi kesamaan-kenyamanan dan ketenteraman bersama dalam bermasyarakat menjadi masyarakat yang *madani*, terstruktur dan masyarakat yang menghargai budaya bangsa, negara, dan agama. Beberapa pilar yang harus senantiasa terbangun dari kesadaran adalah:

1. Membangun Budaya Per-individu
Islam mewajibkan bagi pemeluknya untuk sholat, membayar zakat, dan puasa Ramadhan yang akan melatih jiwa kejujuran dalam diri mereka; juga mensyariatkan setiap muslim untuk berahlaq mulia, bekerja keras, berpikir cerdas dan berhati ikhlas.
2. Membangun Budaya Syar’i
Budaya syar’i berupa persepsi baik pemikiran maupun perasaan kolektif, Islam mewajibkan dakwah, saling menasehati dan beramar ma’ruf nahi munkar. Kiritik konstruktif pada orang yang lebih berkuasa dianggap sebagai partisipasi (*jihad*).
3. Budaya Keteladanan
Keteladanan dalam mengapresiasi dan menyayangi rakyat kecil melalui

⁸ Ehiiaa Oloum al-Din," oleh al-Ghazali, Vol. 3: PP.284–287:

⁹ Fahmi Amhar, Dosen Pascasarjana, Univ. Paramadina, Alumnus Vienna University of Technology, Austria : *Strategi Terpadu Hadapi Korupsi*. Lihat pula Atiqullah dalam pengantar *Psikologi Agama* (Pamekasan, stainpress, 2006).

disyari'atkannya berzakat, ber-shadaqah dan silaturahmi merupakan figur utama para pemimpin dengan senantiasa menerapkan perilaku Islami melalui *ibda' binafsik* kepada komunitas terkecil keluarga.

4. Budaya Pendidikan dan IT

Pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia-manusia peripurna dan seimbang, bukan saja manusia-manusia materialistis, apalagi yang ingin mendapatkan sesuatu dengan cepat, rakus dan instan. Kolektivitas dalam kebersamaan semua kalangan (*jama'ah*) paling utama dilakukan dalam masyarakat untuk membangun persepsi publik yang benar, membangun budaya bermasyarakat yang sehat, sehingga kader-kader profesional berakhlak-mulya secara sehat jermami-ruhani mampu berpartisipasi agar pemerintah melaksanakan tugas supremasi hukum yang aman dan sehat dalam agenda pemberantasan korupsi.

Untuk penanganan tindak korupsi harusnya senantiasa dilakukan secara komprehensif dan sepenuh-hati¹⁰, dengan benerapa tindakan sebagaimana disyari'at-kan agama Islam yaitu;

1. Sistem pengkajian yang layak

Aparat pemerintah harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Hal ini sulit berjalan dengan baik bila gaji mereka tidak mencukupi. Para birokrat tetaplah manusia biasa yang mempunyai kebutuhan hidup serta kewajiban untuk mencukupi nafkah keluarga. Maka, agar bisa bekerja dengan tenang dan tidak mudah tergoda berbuat curang, kepada mereka harus diberikan gaji dan

tunjangan hidup lain yang layak. Rasul dalam hadits riwayat Abu Dawud berkata, "Barang siapa yang disertai pekerjaan dalam keadaan tidak mempunyai rumah, akan disediakan rumah, jika belum beristri hendaknya menikah, jika tidak mempunyai pembantu hendaknya ia mengambil pelayan, jika tidak mempunyai hewan tunggangan (kendaraan) hendaknya diberi. Dan barang siapa mengambil selainnya, itulah kecurangan (*ghalin*)". Oleh karena itu, harus ada upaya pengkajian menyeluruh terhadap sistem penggajian dan tunjangan di negeri ini. Prinsip pemberian gaji rendah kepada pegawai dengan membuka kemungkinan perolehan tambahan pemasukan (yang halal dan haram) sudah semestinya ditinjau ulang. Memang, gaji besar tidak menjamin seseorang tidak korupsi, tapi setidaknya persoalan rendahnya gaji tidak lagi bisa menjadi pemicu korupsi.

2. Larangan menerima suap dan hadiah
Hadiah dan suap yang diberikan seseorang kepada aparat pemerintah pasti mengandung maksud tertentu, karena buat apa memberi sesuatu bila tanpa maksud di belakangnya. Saat Abdullah bin Rawahah tengah menjalankan tugas dari Nabi untuk membagi dua hasil bumi Khaybar separo untuk kaum Muslimin dan sisanya untuk orang Yahudi datang orang Yahudi kepadanya memberikan suap berupa perhiasan agar ia mau memberikan lebih dari separo untuk orang Yahudi. Tawaran ini ditolak keras oleh Abdullah bin Rawahah, "Suap yang kalian tawarkan adalah haram, dan kaum Muslimin tidak memakannya". Mendengar ini, orang

¹⁰ Muhammad Ismail Yusanto dalam HTI On-Line, Rabu, 29 Juli 2009, 23:43

Yahudi berkata, "Karena itulah (ketegasan Abdullah) langit dan bumi tegak" (Imam Malik dalam al-Muwatta'). Tentang suap Rasulullah berkata, "Laknat Allah terhadap penyuap dan penerima suap" (HR. Abu Dawud). Tentang hadiah kepada aparat pemerintah, Rasul berkata, "Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kufur" (HR. Imam Ahmad). Nabi sebagaimana tersebut dari hadits riwayat Bukhari mengancam keras Ibnu Atabiyah lantaran menerima hadiah dari para wajib zakat dari kalangan Bani Sulaym. Suap dan hadiah akan berpengaruh buruk pada mental aparat pemerintah.

3. Perhitungan kekayaan

Orang yang melakukan korupsi, jumlah kekayaannya akan bertambah dengan cepat. Meski tidak selalu orang yang cepat kaya pasti karena korupsi. Tapi perhitungan kekayaan dan pembuktian terbalik sebagaimana telah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khatthab menjadi cara yang bagus untuk mencegah korupsi. Semasa menjadi khalifah, Umar menghitung kekayaan para pejabat di awal dan di akhir jabatannya. Bila terdapat kenaikan yang tidak wajar, yang bersangkutan, bukan jaksa atau orang lain, diminta membuktikan bahwa kekayaan yang dimilikinya itu didapat dengan cara yang halal. Bila gagal, Umar memerintahkan pejabat itu menyerahkan kelebihan harta dari jumlah yang wajar kepada Baitul Mal, atau membagi dua kekayaan itu separo untuk yang bersangkutan dan sisanya untuk negara. Cara inilah yang sekarang dikenal dengan istilah pembuktian terbalik yang sebenarnya

sangat efektif mencegah aparat berbuat curang. Pembuktian material di depan pengadilan oleh jaksa yang selama ini lazim dilakukan terbukti selalu gagal mengungkap tindak korupsi, karena mana ada koruptor meninggalkan jejak, misal bukti transfer, kuitansi, cek atau lainnya?

4. Teladan pemimpin.

Pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila para pemimpin, terlebih pemimpin tertinggi, dalam sebuah negara bersih dari korupsi. Dengan taqwanya, seorang pemimpin melaksanakan tugasnya dengan penuh amanah dan takut melakukan penyimpangan karena Allah SWT pasti melihat semuanya dan di akhirat pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Khalifah Umar menyita sendiri seekor unta gemuk milik puteranya, Abdullah bin Umar, karena kedapatan digembalakan bersama di padang rumput milik Baitul Mal. Hal ini dinilai Umar sebagai bentuk penyalahgunaan fasilitas negara.

5. Supremasi hukum yang baik setimpal

Hal ini berfungsi sebagai pencegah (zawajir), hukuman setimpal atas koruptor diharapkan membuat orang jera dan kapok melakukan korupsi. Dalam Islam, koruptor dikenai hukuman ta'zir berupa tasyhir atau pewartaan (dulu dengan diarak keliling kota, sekarang mungkin bisa ditayangkan di televisi seperti yang pernah dilakukan), penyitaan harta dan hukuman kurungan, bahkan sampai hukuman mati, dan

6. Pengawasan masyarakat

Masyarakat dapat berperan menyuburkan atau menghilangkan korupsi. Masyarakat yang bermental instan akan cenderung menempuh jalan pintas dalam berurusan dengan

aparatus dengan tak segan memberi suap dan hadiah. Sementara masyarakat yang mulia akan turut mengawasi jalannya pemerintahan dan menolak aparat yang mengajaknya berbuat menyimpang. Demi menumbuhkan keberanian rakyat mengoreksi aparat, Khalifah Umar di awal pemerintahannya menyatakan, "Apabila kalian melihatku menyimpang dari jalan Islam, maka luruskan aku walaupun dengan pedang". Dengan pengawasan masyarakat, korupsi menjadi sangat sulit dilakukan. Bila ditambah dengan teladan pemimpin, hukuman yang setimpal, larangan pemberian suap dan hadiah, pembuktian terbalik dan gaji yang mencukupi, insya Allah korupsi dapat diatasi dengan tuntas.

Penutup

Beberapa impulan yang dapat dirumuskan dari pengkajian ini adalah bahwa;

1. Perilaku penyimpangan masyarakat berawal dari berbohong, termasuk didalamnya berbohong dengan data-data statistik merupakan awal dari tindak korupsi yang dilarang dalam agama Islam, sehingga pelibatan peran profetik agama senantiasa efektif dengan melihat gejala-gejala sosio-psychologis masyarakat,
2. Disamping itu penanganan perilaku

korupsi juga melibatkan aspek-aspek budaya sebagai pilar di masyarakat, dengan senantiasa melihat individu sebagai bagian dari masyarakat berupa budaya mempersepsikan tentang kehidupan yang baik, pemikiran dan perasaan kolektif, serta membangun budaya yang berpegang pada sistem aturan yang berlaku berdasarkan kearifan bersama, dan

3. Penanganan korupsi harus dilakukan secara komprehensif minimal melibatkan enam langkah sistemik; sistem pengkajian yang layak, pelarangan menerima suap dan hadiah, perhitungan kekayaan secara halal, keteladanan para pemimpin, penerapan hukum secara baik setimpal, serta pengawasan dalam masyarakat secara obyektif.

Dari beberapa alternatif penanganan dan pemenuhan kebutuhan spiritual masyarakat penggunaan apapun termasuk statistika akhirnya statistik hanyalah sebuah ilmu yang mengantarkan kepada kemaslahatan sehingga penggunaan ilmu hanya akan bermanfaat jika para pemakainya jujur dan mengikuti kaidah-kaidah dalam menerapkan ilmu tersebut sebagai karunia yang berasal dari Yang Maha Kuasa, sehingga yang menjadi kunci adalah bagaimana membangun kesadaran dan kejujuran di semua kalangan masyarakat. *Wa Allāh a'lam bi al-sawāb* □

